



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja  
KPKNL Lahat  
**2025**

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi

## **BAB 1 - PENDAHULUAN**

a. Latar Belakang	3
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
c. Wilayah Kerja KPKNL Lahat	9
d. Mandat yang Diberikan kepada KPKNL Lahat	10
e. Permasalahan Utama	11
f. Sistematika Laporan	12

## **BAB 2 - PERENCANAAN KINERJA**

a. Peran Strategis	15
b. Rencana Strategis	16
c. Peta Strategi Tahun Anggaran 2025	17
d. Kontrak Kinerja	18

## **BAB 3 - AKUNTABILITAS KINERJA**

a. Capaian Kinerja KPKNL Lahat	23
1. Target dan Realisasi Tahun 2025	23
2. Pencapaian KPKNL Lahat	30
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	44
b. Realisasi Anggaran	58
c. Data dan Narasi Kinerja Lainnya	59

## **BAB 4 - PENUTUP**

a. Simpulan	62
b. Saran	64

## **LAMPIRAN**

74

# KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Pembaca yang terhormat,

Adalah menjadi kewajiban kami selaku instansi pemerintah untuk memberikan layanan profesional dan terbaik sesuai tugas kami di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Sudah tentu, seluruh capaian kami dalam melaksanakan tugas harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya kepada para stakeholder.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2025. LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Balance Score Card (BSC) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja KPKNL Lahat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2025. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 113,47% dari nilai maksimal 100%.

LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Lahat serta upaya meningkatkan kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang untuk menjawab semakin tingginya harapan masyarakat atas kinerja dan pelayanan birokrasi.

Akhir kata, kepada seluruh pegawai KPKNL Lahat kami berikan apresiasi yang tinggi atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi dan semua upaya agar mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Tak lupa pula kami membuka diri atas segala saran dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Terima Kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Lahat, 20 Januari 2026  
Kepala Kantor

MUH. TAJUS SYARIFIN



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang disampaikan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Lahat Tahun 2025. LAKIN Tahun 2025 tersebut digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN selaku instansi vertikal yang membawahi KPKNL Lahat yaitu: **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.



Laporan Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2025 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPKNL Lahat dalam meningkatkan kinerja. LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2025 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis DJKN 2020-2024.

LAKIN memiliki fungsi sebagai alat kontrol, alat pengukuran kinerja dan alat pemacu dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, sebagai organisasi yang terus berkembang, KPKNL Lahat sebagai ujung tombak kantor pelayanan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu memiliki kontrol yang baik dalam memantau kinerja yang menjadi tujuan organisasi.

Berdasarkan strategi-strategi yang termaktub dalam Rencana Strategis, KPKNL Lahat menyusun Kontrak Kinerja yang di dalamnya memuat Indikator Utama (IKU). IKU inilah yang kemudian menjadi alat kontrol kuantitatif dalam pengukuran berhasil atau tidaknya KPKNL Lahat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Sepanjang tahun 2025, KPKNL Lahat telah menorehkan pencapaian yang dapat diukur secara kuantitatif melalui penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dihasilkan berdasarkan capaian IKU, yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Integritas sebesar 105,32%.
2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar 101,37% .
3. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara sebesar 103,64%.
4. Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar sebesar 117,62%.
5. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara sebesar 120%.
6. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 120%.
7. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi sebesar 120%.
8. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan sebesar 108%.
9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) sebesar 120%.
10. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara sebesar 120% .
11. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian sebesar 120%.
12. Persentase Produktivitas Lelang sebesar 120%.
13. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKKA) sebesar 120%.
14. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 120%.
15. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sebesar 120%.
16. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum sebesar 115,42%.
17. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID) sebesar 120%.
18. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko sebesar 120%.

**NKO KPKNL  
LAHAT T.A. 2025  
MENCAPAI  
113,47%,  
ADAPUN  
SEBAGAI  
PERBANDINGAN  
NKOTA. 2024  
110,60% DAN T.A.  
2023(115,76%)**

Berdasarkan pencapaian tersebut di atas hasil penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 113,47 % dari nilai maksimal 100%.

Jika dibandingkan dengan NKO Tahun 2024 dan 2023 yaitu masing-masing sebesar 110,60% dan 115,76%, KPKNL Lahat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Ke depan, KPKNL Lahat akan bekerja lebih inovatif guna meningkatkan capaian-capaian strategis sehingga di masa yang akan datang diharapkan tidak saja optimal dan akuntabel (prinsip *Good Governance*) tetapi juga aplikatif dan inovatif.





**KPKNL**

**LAHAT**

*sewelo*



# MUH. TAJUS SYARIFIN

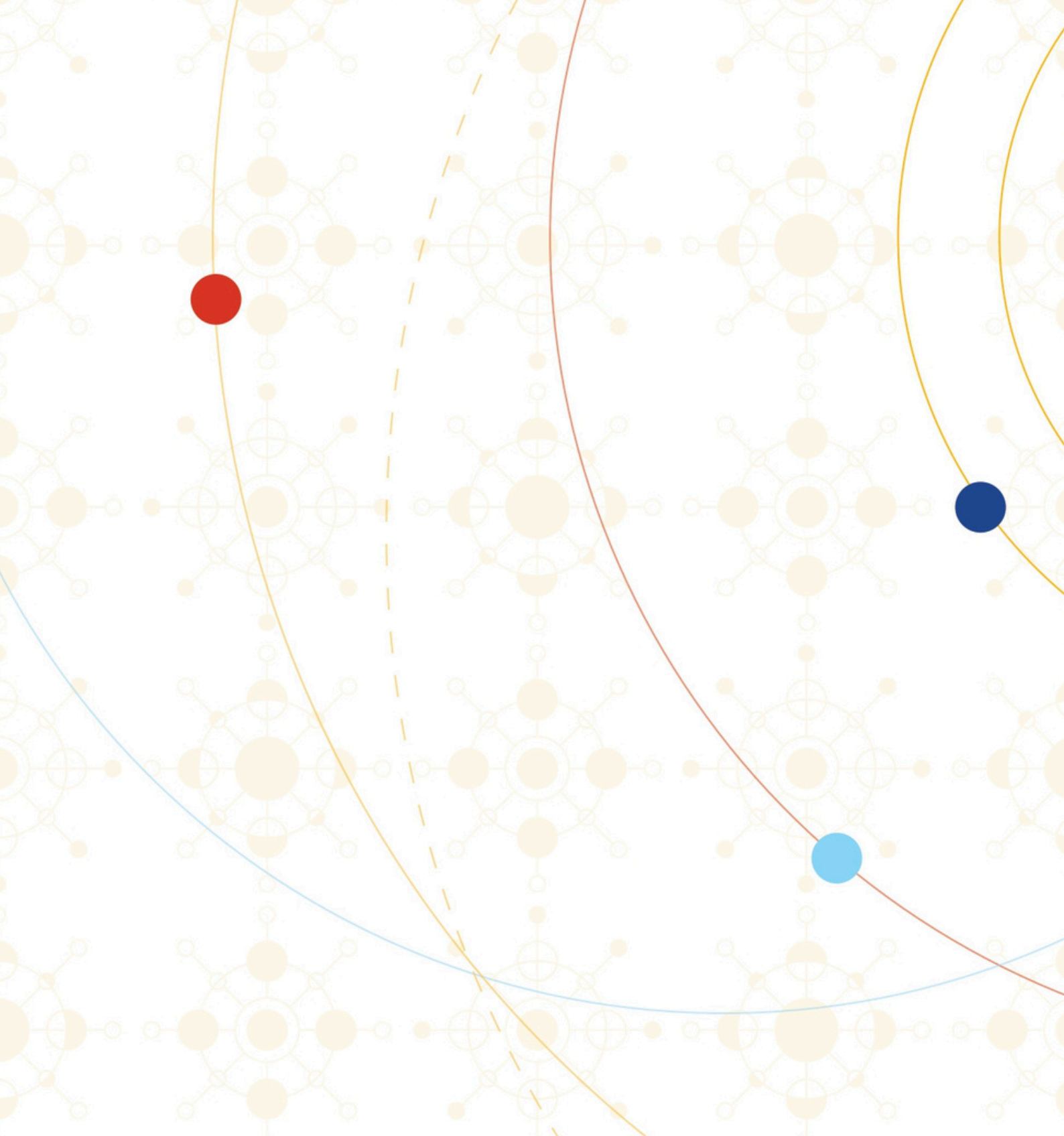
Kepala KPKNL Lahat





# PENDAHULUAN





**BAB I**

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

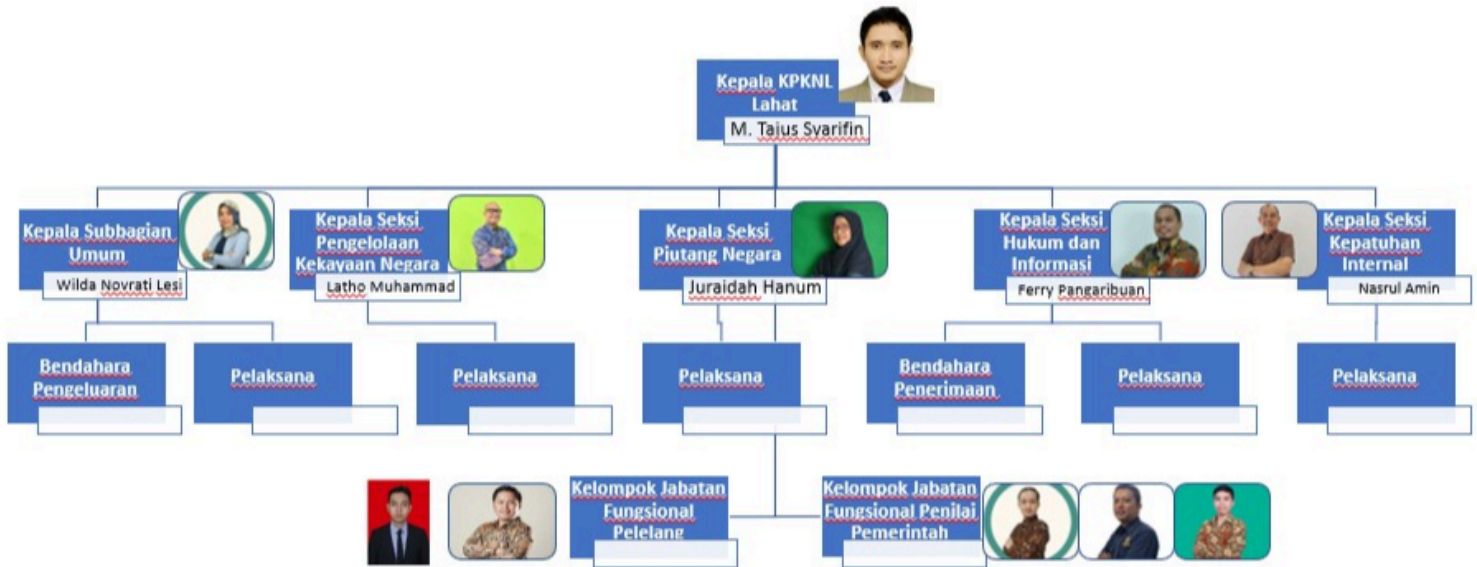
Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Lahat dari bulan Januari hingga Desember Tahun 2025.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, yang mempunyai kewenangan melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang di wilayah kerja KPKNL Lahat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Struktur organisasi KPKNL Lahat terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor) dan 5 (lima) eselon IV.a (Kepala Seksi/Kasubbag Umum) dan 5 (lima) pejabat fungsional.

## B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

## STRUKTUR ORGANISASI



### VISI

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada Kepala KPKNL Lahat, seluruh pegawai KPKNL Lahat telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN yaitu:

**"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."**

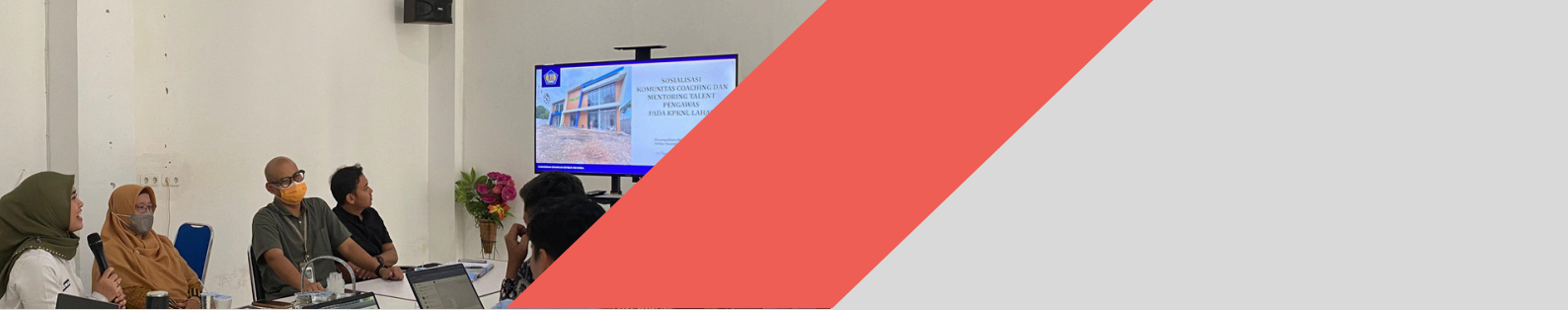
Visi dimaksud menjadi semangat sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Lahat dalam melaksanakan tugas. visi yang ditetapkan dapat diuraikan ke dalam frasa per frasa.

**Pengelola Kekayaan Negara** merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel.

**Profesional** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan.

**Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.



Adapun Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontribusi** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset dan di level nasional dan internasional.
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya.

## MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Lahat menetapkan Misi yang selaras dengan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan mendukung Misi Kementerian Keuangan Nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

## TUJUAN

Tujuan merupakan bagian dari misi yang berupa penjabaran misi organisasi dan merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau diperoleh dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun ke depan. Oleh karena itu, tujuan KPKNL Lahat memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Lahat adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif dan efisien.



**SASARAN** Sasaran merupakan penjabaran dan tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, semesteran dan tahunan. Sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Lahat dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### A. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara;
- Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran;
- Terselenggaranya informasi nilai terkini dan nilai potensial kekayaan negara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### B. Piutang Negara

- Terwujudnya pengurusan piutang negara secara sehat dan bersih;
- Tercapainya target piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS);
- Terwujudnya pengelolaan dokumen asli barang jaminan.

#### C. Pelayanan Lelang

- Terselenggaranya pelayanan lelang bersih, transparan dan akuntabel;
- Tercapainya target hasil lelang baik dari pokok lelang maupun bea lelang.

#### D. Pelayanan Penilaian

- Penertiban BMN satker K/L tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2019 yang optimal;
- Administrasi Seksi Pelayanan Penilaian yang tertib;
- SDM Penilai yang handal;
- Pelayanan penilaian dalam rangka utilisasi BMN yang optimal;
- Pelayanan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara yang optimal;
- Tersedianya harga pasar yang wajar dalam rangka penyusunan DKPB.

#### E. Hukum dan Informasi

- Tercapainya peningkatan penatausahaan BKN dan penyajian informasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Tercapainya optimalisasi penanganan perkara.

#### F. Kepatuhan Internal

- Pelaksanaan SOP Unggul tepat waktu;
- Penyusunan kontrak kinerja yang tepat waktu dan mencerminkan capaian kinerja masing-masing pegawai dan organisasi;
- Mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi beserta langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah;
- Memastikan kode etik dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku dijalankan oleh seluruh pegawai;
- Memastikan hasil pemeriksaan aparat fungsional ditindaklanjuti;
- Laporan hasil pelaksanaan SOP Layanan Unggulan yang andal dan akurat



### G. Umum

- Terlaksananya pemberian dukungan teknis dan administrasi baik di Kantpr Wilayah maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
- Pelaksanaan DIPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional kantor.

## FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Lahat menyelenggarakan fungsi di antaranya sebagai berikut:

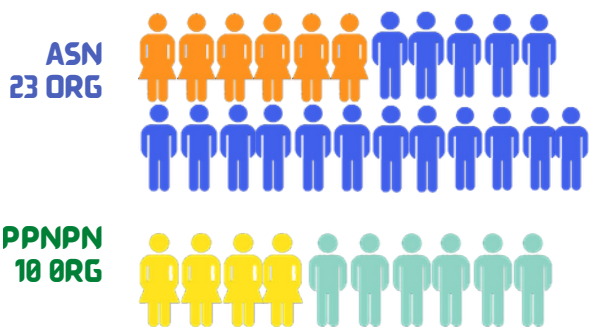
- Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- Pelaksanaan pelayanan lelang;
- Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.



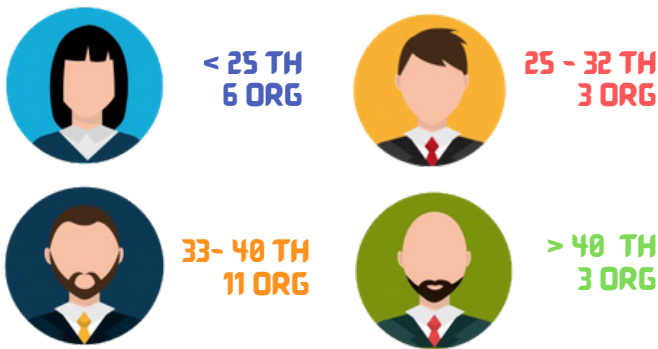
## KOMPOSISI PEGAWAI

Untuk menjalankan semua tugasnya, KPKNL Lahat memiliki 23 (dua puluh tiga) Pegawai ASN serta didukung oleh 10 (sepuluh) Pegawai PPNPN (honorar). Adapun komposisi pegawai ASN pada KPKNL Lahat dapat dipertakan berdasarkan golongan, pendidikan, usia dan kelompok fungsional.

### KOMPOSISI PEGAWAI ASN - PPNPN



### KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA



### KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



## KOMPOSISI PEGAWAI

### KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



### KOMPOSISI PEGAWAI KELOMPOK FUNGSIONAL KHUSUS



**C. WILAYAH KERJA KPKNL LAHAT**

KPKNL Lahat merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki wilayah kerja yang luas meliputi 8 (delapan) kota dan/atau kabupaten. Adapun kota dan kabupaten yang termasuk wilayah kerja KPKNL Lahat adalah sebagai berikut:

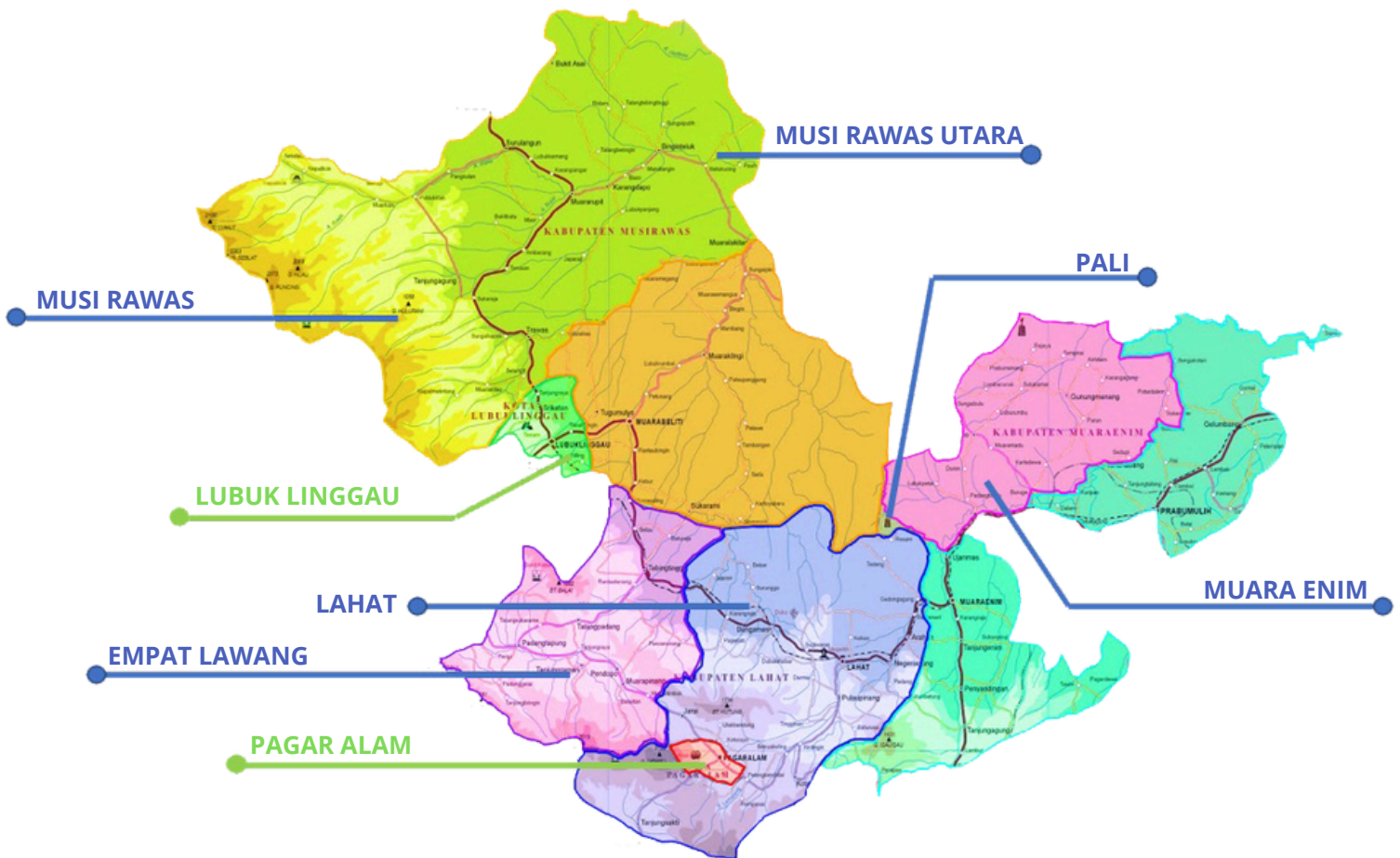


**2 KOTA**

LUBUK LINGGAU  
PAGAR ALAM

**6 KABUPATEN**

LAHAT  
MUARA ENIM  
MUSI RAWAS  
MUSI RAWAS UTARA  
EMPAT LAWANG  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)



#### D. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA KPKNL LAHAT

KPKNL Lahat sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Lahat dikelompokkan dalam 2 (dua) tema pokok, yaitu:

- Tema **Kekayaan Negara** dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- Tema **Pendapatan Negara** dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan ekonomi dan keadilan masyarakat.

#### STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

- Membuat usulan atas peraturan-perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, lelang dengan akurat dan akuntabel;
- Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
- Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pengelolaan Anggaran;

## E. PERMASALAHAN UTAMA

Transformasi Kelembagaan (TK) Kementerian Keuangan merupakan salah satu program lanjutan dari program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2007 silam. TK Kementerian Keuangan bertujuan menjadikan Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang bertaraf internasional yang memegang peranan penting dalam program pembangunan bangsa. Kementerian Keuangan sebagai institusi penting di negara ini memiliki peran-peran strategis yang berkaitan dengan perekonomian bangsa tentunya memerlukan perbaikan di semua instansi.

TK adalah wujud dari perubahan organisasi, model bisnis, sumber daya manusia, dan proses bisnis saat ini ke dalam bentuk yang berbeda yang mampu merespon perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan fungsi DJKN dari *asset manager* tentunya berdampak pada perluasan cakupan pengelolaan kekayaan negara yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar. KPKNL Lahat sebagai institusi di bawah lingkungan DJKN pun memiliki tanggung jawab yang besar dalam tugas *special mission* untuk mengurus Piutang Negara, Penilaian dan Lelang. Hal tersebut membuat cakupan tugas KPKNL Lahat menjadi semakin berkembang di masa mendatang.

KPKNL Lahat sebagai satu institusi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik sehingga hal ini mengharuskan KPKNL Lahat untuk terus mendukung dan melayani *stakeholder* lebih inovatif dan efisien.



Laporan Kinerja KPKNL Lahat tahun 2025 terdiri dari:

### 1. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara umum KPKNL Lahat, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) KPKNL Lahat.

### 2. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun anggaran 2025.

### 3. Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan hasil capaian kinerja, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan hasil capaian kinerja secara keseluruhan dengan beberapa tahun sebelumnya, pencapaian tahun ini dengan Rencana Strategis KPKNL Lahat 2019-2024 atau target jangka menengah, evaluasi dan analisa keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja termasuk program atau kegiatan penunjang atau tambahan. Disajikan pula realisasi anggaran untuk mencapai target sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Lahat.

### 4. Penutup

Bagian penutup menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Lahat, kendala dan/atau hambatan yang dihadapi serta saran dan masukan yang dapat dilakukan oleh KPKNL Lahat di masa mendatang agar dapat terus meningkatkan kinerja.

### 5. Lampiran

Lampiran menyajikan dokumen Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* dan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat tahun 2025 serta dokumen/hal lain yang dianggap perlu.





# BAB 2



# PERENCANAAN KINERJA



## A. PERAN STRATEGIS

KPKNL Lahat memiliki peran strategis organisasi dalam hal sebagai berikut:

### MANAJEMEN ASET NEGARA

KPKNL Lahat berperan mengoptimalkan pengelolaan aset negara/BMN. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan upaya-upaya antara lain utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara sampai dengan tahap *asset disposal* serta didukung dengan penilaian untuk informasi nilai aset yang wajar sesuai dengan penggunaan tertinggi dan terbaik.

Selain itu KPKNL Lahat memiliki peran strategis dalam mendorong satuan kerja untuk mengamankan aset melalui program sertifikasi tanah BMN.

### PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

KPKNL Lahat bereperan dalam pengurusan Piutang Negara/daerah yang dilakukan melalui berbagai proses/tahapan penyelesaian Piutang Negara. Sejalan dengan kebijakan pengembalian Piutang Negara eks BUMN, KPKNL Lahat lebih fokus dalam menggali peluang penyelesaian Piutang Negara baik Pusat maupun daerah.

### PELAYANAN LELANG

KPKNL Lahat berperan dalam pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Dengan keuntungan yang ditawarkan yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet melalui *disposal asset*.

Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi informasi maka metode penjualan barang melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui internet (*e-auction*).

### PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

KPKNL Lahat memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara, KPKNL Lahat memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (BIAD) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Lahat memperoleh hasil bea lelang termasuk bea lelang yang berasal dari lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## B. RENCANA STRATEGIS

Pada tahun 2020, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-2915/KN.1/2020 Hal Penyampaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 Tanggal 09 September 2020 disampaikan bahwa para Kantor Wilayah DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), termasuk KPKNL Lahat untuk dapat mendukung mewujudkan Visi DJKN, Visi Kementereian Keuangan serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dengan berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

## TUJUAN

Sejalan dengan Rencana Strategis DJKN dan misi yang diemban, KPKNL Lahat mempunyai tujuan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara;
2. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
3. Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti;
4. Peningkatan pelayanan penilaian;
5. Optimalisasi pengurusan Piutang Negara;
6. Peningkatan pelayanan lelang;
7. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

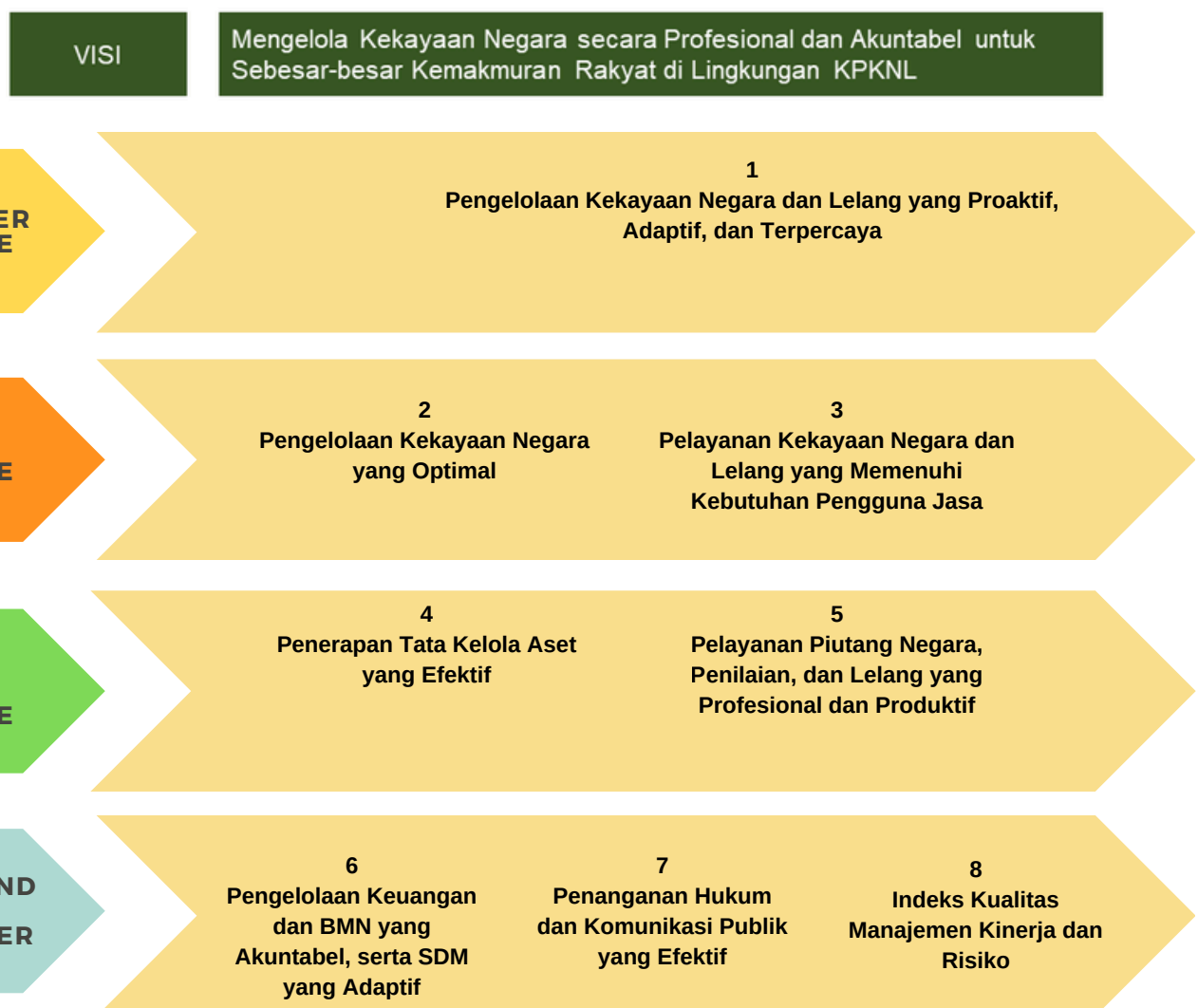


## SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas, KPKNL Lahat menetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2025 yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
3. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa
4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif
5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif
6. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif
7. Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif
8. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

## C. PETA STRATEGI TAHUN ANGGARAN 2023



## D. KONTRAK KINERJA

Perjanjian/kontrak kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Bersamaan dengan telah ditetapkannya Peta Strategi, KPKNL Lahat memiliki perjanjian kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor PK-3/WKN.03/2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1a-CP	Indeks Integritas	100
		1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar	100%
		2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100%
3	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77
		3b-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74
4	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	4a-CP	Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%
		5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%

6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKKA)	100
		6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100
		6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100
		7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID)	80
8	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80

Berdasarkan *Strategy Map Kemenkeu-Three* KPKNL Tahun 2025, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 18 (delapan belas) Indikator Utama (IKU) yaitu :

1. Indeks Integritas.
2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.
3. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara.
4. Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar.
5. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.
6. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.
7. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.
8. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan.
9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).
10. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara.
11. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
12. Persentase Produktivitas Lelang.
13. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKKA).
14. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.
15. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.
16. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum.
17. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID).
18. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko.



# AKUNTABILITAS KINERJA







**BAB 3**



Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai perbandingan antara target dan capaian kinerja KPKNL Lahat tahun 2025 yang dilengkapi dengan capaian kinerja tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021 sebagai referensi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai hambatan dan evaluasi secara menyeluruh agar dapat menjadi masukan pada tahun berikutnya. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta relisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada tahun 2025.

Capaian kinerja organisasi diukur dengan membandingkan data antara target dan realisasi, yang disajikan dalam bentuk persentase. Capaian ini dapat menunjukkan seberapa jauh proses atau kemajuan yang telah didapat dalam periode waktu tertentu.

### A. CAPAIAN KINERJA KPKNL LAHAT

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (*output*) KPKNL Lahat pada tahun 2024 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

### 1. TARGET DAN PENCAPAIAN KPKNL LAHAT TAHUN 2025

1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya					
	1a-CP - Indeks Integritas					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Po/K P
Target	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	100	117	120	105.32	105.32	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	100.00%	117.00%	120.00%	105.32%	105.32%	
Indeks 120	100.00%	117.00%	120.00%	105.32%	105.32%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya					
	1b-CP - Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Po/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	177.50%	123.48%	93.74%	101.37%	101.37%	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	177.50%	123.48%	93.74%	101.37%	101.37%	
Indeks 120	120.00%	120.00%	93.74%	101.37%	101.37%	



3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					
	2a-CP - Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Po/K P
Target	50%	60%	80%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	114.10%	107.14%	109.02%	103.64%	103.64%	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	228.21%	178.57%	136.28%	103.64%	103.64%	
Indeks 120	120.00%	120.00%	120.00%	103.64%	103.64%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					
	2b-CP - Persentase Realisasi Pokok Lelang					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Po/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	180.60%	124.70%	122.70%	117.62%	117.62%	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	180.60%	124.70%	122.70%	117.62%	117.62%	
Indeks 120	120.00%	120.00%	120.00%	117.62%	117.62%	
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					
	2c-CP - Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Po/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	666.33%	421.91%	351.80%	168.76%	168.76%	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	666.33%	421.91%	351.80%	168.76%	168.76%	
Indeks 120	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	



6	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa					
	3a-N - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	77	77	77	77	77	Max / TLK
Realisasi	9,884	9,852	9,841	9,826	9,826	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	12,836%	12,795%	12,781%	12,761%	12,761%	
Indeks 120	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	
7	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa					
	3b-CP - Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	74	74	74	74	74	Max / TLK
Realisasi	8,750	9,899	10,695	9,695	9,695	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	11,824%	13,377%	14,452%	13,101%	13,101%	
Indeks 120	11,824%	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	
8	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif					
	4a-CP - Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	5%	40%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	50,667%	14,000%	15,111%	10,800%	10,800%	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	1,013,333%	35,000%	25,185%	10,800%	10,800%	
Indeks 120	12,000%	12,000%	12,000%	10,800%	10,800%	



9	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif					
	4b-CP - Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	15%	50%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	1,517%	23,397%	23,397%	55,771%	55,771%	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	10,116%	46,793%	31,196%	55,771%	55,771%	
Indeks 120	10,116%	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	
10	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif					
	5a-CP - Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	10,000%	10,000%	10,000%	12,517%	12,517%	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	10,000%	10,000%	10,000%	12,517%	12,517%	
Indeks 120	10,000%	10,000%	10,000%	12,000%	12,000%	
11	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif					
	5b-CP - Tingkat Kualitas Layanan Penilaian					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	70%	70%	70%	70%	70%	Max / TLK
Realisasi	11,400%	11,175%	10,778%	10,983%	10,983%	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	16,286%	15,964%	15,398%	15,690%	15,690%	
Indeks 120	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	



12 Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif						
5c-CP - Persentase Produktivitas Lelang						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	30%	40%	70%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	5,552%	7,645%	9,192%	11,061%	11,061%	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	18,505%	19,111%	13,132%	13,827%	13,827%	
Indeks 120	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	
13 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif						
6a-CP - Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKKA)						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	
Indeks 120	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	
14 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif						
6b-N - Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa						
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	10,000	10,000	10,000	12,000	12,000	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	10,000%	10,000%	10,000%	12,000%	12,000%	
Indeks 120	10,000%	10,000%	10,000%	12,000%	12,000%	



15	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif					
	6c-N - Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	20%	40%	60%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	3,253%	6,000%	11,800%	13,095%	13,095%	
Capaian (Indeks Tanna Batas)	16,263%	15,000%	19,667%	16,368%	16,368%	
Indeks 120	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	
16	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif					
	7a-CP - Indeks Penanganan Permasalahan Hukum					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	11,608	11,258	11,665	11,542	11,542	
Capaian (Indeks Tanna Batas)	11,608%	11,258%	11,665%	11,542%	11,542%	
Indeks 120	11,608%	11,258%	11,665%	11,542%	11,542%	
17	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif					
	7b-N - Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	80	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	11,500	11,250	11,167	11,125	11,125	
Capaian (Indeks Tanna Batas)	14,375%	14,063%	13,958%	13,906%	13,906%	
Indeks 120	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	12,000%	



18	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif					
	8a-N - Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2025	Pol/K P
Target	80	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	9,822	9,402	9,600	9,663	9,663	
Capaian (Indeks Tanpa Batas)	12,277%	11,753%	11,999%	12,079%	12,079%	
Indeks 120	12,000%	11,753%	11,999%	12,000%	12,000%	



Sebagai perbandingan, agar dapat mengukur performa kinerja KPKNL Lahat, kami sajikan capaian KPKNL Lahat pada tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021. Rincian indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi target pada tahun sebelumnya tentu tidak sama persis dengan IKU di tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh tantangan global dan evaluasi secara menyeluruh, sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan melalui rencana strategis untuk mencapai kesempurnaan pencapaian visi dan misi DJKN khususnya KPKNL Lahat. Adapun target dan capaian kinerja KPKNL Lahat pada tahun 2024, 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

## 2. PENCAPAIAN KPKNL LAHAT TAHUN SEBELUMNYA

### Target dan Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2024

1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan					
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	23,432%	11,240%	8,544%	8,923%	8,923%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	23,432%	11,240%	8,544%	8,923%	8,923%	
Indeks 120	120%	112%	8,544%	8,923%	8,923%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan					
	1b-CP Indeks Integritas					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	10	20	30	8,917	8,917	Max/TLK
Realisasi	10	20	42	9,244	9,244	
Capaian (Indeks tanpa batas)	100%	100%	140%	10,367%	10,367%	
Indeks 120	100%	100%	120%	10,367%	10,367%	



3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	30%	50%	60%	7,150%	7,150%	Max/TLK
Realisasi	6,794%	8,716%	8,343%	8,241%	8,241%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	22,648%	17,432%	13,905%	11,526%	11,526%	
Indeks 120	120%	120%	120%	11,526%	11,526%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
	2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	10%	45%	60%	8,650%	8,650%	Max/TLK
Realisasi	7,500%	9,286%	9,286%	9,643%	9,643%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	750%	20,635%	15,476%	11,148%	11,148%	
Indeks 120	120%	120%	120%	11,148%	11,148%	
5	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal					
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	19,892%	19,880%	12,811%	14,821%	14,821%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	19,892%	19,880%	12,811%	14,821%	14,821%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	



6	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal					
	3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	12,465%	14,169%	9,242%	23,172%	23,172%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	12,465%	14,169%	9,242%	23,172%	23,172%	
Indeks 120	120%	120%	9,242%	120%	120%	
7	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien					
	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	75	75	75	75	Max/TLK
Realisasi	10,250	10,196	10,590	10,682	10,682	
Capaian (Indeks tanpa batas)	137%	13,595%	14,120%	14,243%	14,243%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	
8	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif					
	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	20%	40%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	20%	4,629%	9,073%	10,016%	10,016%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	100%	11,573%	15,121%	10,016%	10,016%	
Indeks 120	100%	116%	120%	10,016%	10,016%	



9	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif					
	5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	10%	32%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	26%	5,371%	8,861%	12,670%	12,670%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	263%	16,786%	11,076%	12,670%	12,670%	
Indeks 120	120%	120%	11,076%	120%	120%	
10	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif					
	5c-N Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	25	55	88	100	100	Max/TLK
Realisasi	25	55	100	100	100	
Capaian (Indeks tanpa batas)	100%	100%	11,364%	100%	100%	
Indeks 120	100%	100%	11,364%	100%	100%	
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif					
	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	75%	50%	25%	25%	Max/TLK
Realisasi	8,750%	6,250%	50%	0%	0%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	113%	11,667%	100%	13,333%	13,333%	
Indeks 120	113%	117%	100%	120%	120%	



12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif					
	6b-CP Persentase Produktivitas Lelang					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	30%	45%	60%	89%	89%	Max/TLK
Realisasi	6,157%	8,332%	10,769%	120%	120%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	205%	18,516%	17,949%	13,483%	13,483%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	
13	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					
	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	16%	16%	16%	16%	16%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	1%	1%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	200%	200%	200%	19,994%	19,994%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	
14	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif					
	8a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	45%	60%	80%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	6,964%	9,991%	116%	119%	119%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	155%	16,652%	145%	13,222%	13,222%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	



15	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif					
	8b-CP Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	85	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	100	98	98	9,732	9,732	
Capaian (Indeks tanpa batas)	118%	11,575%	11,483%	11,449%	11,449%	
Indeks 120	118%	116%	11,483%	11,449%	11,449%	
16	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel					
	9a-CP Indeks Kinerja Anggaran (IKA)					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	9,699	10,694	10,486	120	120	
Capaian (Indeks tanpa batas)	97%	10,694%	10,486%	120%	120%	
Indeks 120	97%	107%	10,486%	120%	120%	
17	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel					
	9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	10%	10%	10%	10%	10%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	200%	200%	200%	200%	200%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	



18	Komunikasi Publik yang Efektif					
	10a-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	10,348	100	100	100	100	
Capaian (Indeks tanpa batas)	129%	125%	125%	125%	125%	
Indeks 120	120%	120%	120%	120%	120%	
19	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah					
	11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	5	15	20	82	82	Max/TLK
Realisasi	5	15	20	9,773	9,773	
Capaian (Indeks tanpa batas)	100%	60%	60%	11,918%	11,918%	
Indeks 120	100%	100%	100%	11,918%	11,918%	
20	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah					
	11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	105%	105%	
Capaian (Indeks tanpa batas)	100%	100%	100%	105%	105%	
Indeks 120	100%	100%	100%	105%	105%	

## Target dan Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	%
<b>Stakeholder Perspective</b>					
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang			130,32%
		a. PNBPN Pengelolaan BMN	Rp2.920.400.000	Rp3.056.485.438	
		b. PNBPN Piutang Negara	Rp300.000	Rp555,512	
		c. PNBPN Lelang	Rp1.500.000.000	Rp2.704.231.298	
		Persentase Produktivitas Lelang			45,01%
		Jumlah Lot lelang Laku Secara keseluruhan		344	
		Jumlah Lot lelang TAP Secara keseluruhan		366	
		Jumlah Lot lelang Wanprestasi Secara Keseluruhan		19	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp156.000.000	Rp172.000.000	110,26%
<b>Customer Perspective</b>					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang			180,28%
		Pokok Lelang Kelas I	Rp25.500.000.000	Rp57.050.057.766	
		Pokok Lelang Pegadaian	Rp10.000.000.000	Rp20.098.115.600	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp156.000.000	Rp172.000.000	110,26%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		90,52	90,52%





Internal Process Perspective					
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK			86,19%
		a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2023)			87,83%
		b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2022			81,26%
		Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	48	74	154,17%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	3	5	166,67%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)			123,01%
		1.Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN	74	90	
		2.Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi	7	9	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0%	0%
6	Pelaksanaan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction			100%
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Auction		389	
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Conventional Auction		-	
		Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang		389	100%
7	Edukasi yang Efektif	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90,50	92,18	92,18
8	Pengawasan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara			95%
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L		18	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L		17	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022		20	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023		17	
Learning & Growth Perspective					
9	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	91,19	91,19
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	93,29%	93,29%
		Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	267,00%	267,00%

## Target dan Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	%
<b>Stakeholder Perspective</b>					
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang			120,86%
		a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp2.142.000.000	Rp2.696.279.981	
		b. PNBP Piutang Negara	Rp564.000	Rp829.409	
		c. PNBP Lelang	Rp1.300.000.000	Rp1.463.779.683	
		Persentase Produktivitas Lelang			65,38%
		Jumlah Lot lelang Laku Secara keseluruhan		414	
		Jumlah Lot lelang TAP Secara keseluruhan		233	
		Jumlah Lot lelang Wanprestasi Secara Keseluruhan		26	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp160.650.135	Rp211.704.729	131,78%
<b>Customer Perspective</b>					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang			154,66%
		Pokok Lelang Kelas I	Rp23.000.000.000	Rp28.733.273.256	
		Pokok Lelang Pegadaian	Rp8.000.000.000	Rp19.212.815.300	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp160.650.135	Rp211.704.729	131,78%
3	Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna LayananKPKNL	4,60	4,65	4,65%



Internal Process Perspective					
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK			85,09%
		a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2022)		83,01%	
		b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2021		91,33%	
		Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	34	76	223,53%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	3	8	266,67%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)			121,14%
		1.Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN	50	64	
		2.Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi	98	112	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0%	0%
6	Pelaksanaan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction			100%
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Auction		304	
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Conventional Auction		-	
		Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang		304	100%
7	Pengawasan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara			100%
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		12	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L		16	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021		12	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022		16	



Learning & Growth Perspective					
8	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	100%
9	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM	75	93,32	93,32
		Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	96,96	124,43
		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	95,10	121,20%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	99,09%	105,66%
		Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	103,76%	103,76%





### Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025
Presentase Hasil Pokok Lelang	97,45%	154,66%	217,32%	148,21%	117,62%
Presentase Implementasi E-Auction	108,70%	108,70%	100%	100%	100%
Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	103,87%	103,76%	93,29%	96,76%	120%

**Catatan:**

Indikator Utama yang dibandingkan hanyalah indikator utama yang terdapat pada setiap tahunnya agar dapat dilakukan perbandingan.





### 3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 18 (delapan belas) IKU KPKNL Lahat Tahun 2025 hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJKN Tahun 2025 sebagai berikut:

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila dapat mewujudkan APBN yang efektif dan efisien. Upaya untuk mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu:

- Indeks Integritas
- Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, adalah Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara serta Penerimaan Hasil lelang direpresentasikan oleh PNBPN dari lelang. Jumlah Penerimaan Negara yang dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2025 adalah sebesar Rp5,976,355,535,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,895,660,000,00 atau dalam persentase sebesar 101,37% dari target 100%.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Indeks integritas yang dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2025 adalah sebesar 105,32 dari target yang ditetapkan sebesar 100.

Sasaran Strategis I

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya



## Sasaran Strategis II

### Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, KPKNL Lahat mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara, Persentase Realisasi Pokok Lelang, dan Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.

- Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara


Dalam menjalankan amanah sebagai pengelola aset negara di wilayah kerja Lahat dan sekitarnya, KPKNL Lahat berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dari Barang Milik Negara (BMN) memberikan manfaat maksimal. Komitmen ini tercermin jelas dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara.

Pada tahun berjalan, KPKNL Lahat berhasil mencatatkan performa luar biasa dengan capaian sebesar 103,64%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%. Angka ini bukan sekadar statistik; ia merepresentasikan efektivitas proses sertifikasi, pemanfaatan aset yang menghasilkan PNBP, serta pengawasan dan pengendalian yang ketat. Keberhasilan ini adalah buah dari kolaborasi solid dengan para pemangku kepentingan (satuan kerja) demi mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel dan produktif.

- Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pelaksanaan lelang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan didahului dengan adanya pengumuman lelang dapat menghasilkan lelang yang kompetitif dan hasilnya maksimal. Hasil lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari adanya peminat lelang dan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang. Dari pelaksanaan lelang tersebut dipungut bea lelang pembeli





dan penjual yang masing-masing kategori lelang memiliki besaran persentase bea lelang sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU guna mencapai sasaran strategis dimaksud yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Pokok Lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurang Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II dalam periode tertentu.

Jumlah pokok lelang yang dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2025 adalah sebesar Rp68,218,534,390,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp58,000,000,000,00 atau dalam persentase sebesar 117,62% dari target 100%.



### Capaian Pokok Lelang KPKNL Lahat Tahun 2021-2025



- Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Dinamika pengelolaan piutang negara tahun ini ditandai dengan adanya adendum target sebagai bentuk optimisme organisasi. Meski target Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara mengalami penyesuaian dari Rp195.000.000 menjadi Rp411.603.000, KPKNL Lahat menjawab tantangan tersebut dengan performa yang luar biasa.

Hingga akhir periode, KPKNL Lahat berhasil membukukan realisasi sebesar Rp694.615.064 atau mencapai 168,76% dari target adendum. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa tim Piutang Negara tidak hanya bekerja sesuai rencana, tetapi juga mampu berakselerasi di tengah peningkatan target, memastikan setiap piutang negara terkelola dengan hasil yang optimal bagi kas negara.



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dan Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.

- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) merupakan muara dari seluruh upaya perbaikan birokrasi yang dilakukan di KPKNL Lahat. Pada tahun ini, upaya transformasi layanan tersebut membuahkan apresiasi yang luar biasa dari para pengguna layanan.

Berdasarkan hasil survei kepuasan, KPKNL Lahat berhasil meraih skor 98,26, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 77. Dengan capaian persentase sebesar 127,61%, angka ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap integritas, kecepatan, dan transparansi layanan kami. Prestasi ini menjadi mandat bagi KPKNL Lahat untuk terus mempertahankan standar pelayanan tinggi dan terus berinovasi demi kemudahan stakeholder.

- Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah kunci dari keberhasilan implementasi kebijakan. Pada tahun ini, KPKNL Lahat mencatatkan prestasi gemilang melalui Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (Edukom). Indeks ini mengukur sejauh mana edukasi yang diberikan oleh Seksi Piutang Negara dan fungsional Pelelang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Melampaui target yang ditetapkan sebesar 74, KPKNL Lahat berhasil meraih nilai indeks 98,07, atau setara dengan capaian 131,01%. Tingginya angka ini membuktikan bahwa strategi diseminasi informasi yang dijalankan—baik terkait prosedur lelang maupun penyelesaian piutang negara—berjalan sangat efektif, transparan, dan edukatif, sehingga meminimalisir asimetri informasi di lapangan.

## Sasaran Strategis III

### Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa



## Sasaran Strategis IV

### Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating).
- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum

Untuk mewujudkan Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) IKU antara lain:

- **Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan**

Sertifikasi BMN berupa tanah merupakan langkah krusial dalam pengamanan aset negara secara hukum. Pada tahun ini, KPKNL Lahat kembali menunjukkan performa solid dengan mencapai 81% dari target 75%, atau setara dengan capaian 108%.

Keberhasilan ini ditopang oleh efektivitas penyelesaian target pada berbagai kategori. Terutama pada kategori K1 (Tanah yang belum bersertipikat), KPKNL Lahat berhasil menyelesaikan 44 bidang dari target 36. Begitu pula pada kategori K3, realisasi mencapai 34 bidang dari target 31. Meskipun terdapat dinamika pada kategori K2, secara keseluruhan progres sertifikasi tetap berjalan melampaui ekspektasi. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi sinergis antara KPKNL Lahat, Kantor Pertanahan (BPN), dan Satuan Kerja di wilayah kerja Lahat, Empat Lawang, dan sekitarnya.

- **Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan setiap aset negara memberikan nilai manfaat maksimal. Pada periode ini, KPKNL Lahat mencatatkan capaian luar biasa sebesar 323,74% dari target 100%.

Keberhasilan ini didorong oleh tingginya responsivitas Satuan Kerja terhadap rekomendasi yang diberikan. Dari target 11 tindak lanjut, tim KPKNL Lahat berhasil mengawal hingga 64 rekomendasi dieksekusi oleh Satker. Hal ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi yang disusun oleh KPKNL Lahat memiliki kualitas yang relevan dan aplikatif, sehingga mendorong Satker untuk segera melakukan perbaikan tata kelola aset. Meskipun tantangan dalam volume evaluasi aset tetap menjadi fokus, efektivitas tindak lanjut yang mencapai hampir 600% dari target ini menjadi bukti nyata sinergi yang kuat antara KPKNL Lahat dan Satker.



- **Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara**

Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) bukan sekadar mengejar angka, melainkan memastikan setiap penagihan memberikan hasil yang optimal bagi pemulihan keuangan negara. Pada tahun ini, KPKNL Lahat berhasil mencatatkan indeks capaian yang luar biasa pada IKU Persentase Realisasi Penyelesaian BKPN dengan raihan 125,17%.

Meskipun secara numerik jumlah berkas yang diselesaikan berjumlah 16 BKPN, nilai capaian performa yang melampaui target (125,17% dari target 100% indeks) membuktikan bahwa proses penyelesaian yang dilakukan memiliki kualitas dan efektivitas yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan strategi tim Piutang Negara yang fokus pada penyelesaian berkas-berkas yang memberikan dampak signifikan bagi penurunan outstanding piutang negara, sehingga setiap langkah yang diambil berkontribusi besar pada rapor kinerja organisasi.

- **Tingkat Kualitas Layanan Penilaian**

Kualitas hasil penilaian adalah kunci dari pengambilan keputusan manajerial aset yang akuntabel. Pada tahun ini, IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian KPKNL Lahat mencatatkan performa yang sangat impresif dengan realisasi mencapai 156,9% dari target 70%.

Keunggulan ini merupakan hasil dari sinergi tiga aspek utama:

1. Kecepatan: Norma waktu layanan berhasil melampaui standar dengan skor 105,82.
2. Integritas Data: Tingkat akurasi data penilaian mencapai nilai sempurna 100.
3. Kualitas Teknis: Nilai hasil kaji ulang laporan penilaian yang sangat tinggi sebesar 125.

Tingginya angka kaji ulang laporan menunjukkan bahwa setiap produk penilaian yang dihasilkan penilai pemerintah di KPKNL Lahat telah melalui proses kendali mutu yang ketat, memenuhi standar profesi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun legal.

- **Persentase Produktivitas Lelang**

Lelang bukan sekadar mekanisme penjualan, melainkan indikator denyut ekonomi di wilayah kerja KPKNL Lahat. Tahun ini, Produktivitas Lelang mencatatkan angka yang sangat positif dengan realisasi 110,61% dari target 80%. Secara persentase kinerja, pencapaian ini menyentuh angka 138,27%.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari strategi manajemen jadwal lelang yang agresif, terlihat dari Frekuensi Lelang yang melampaui target hingga 120%. Di sisi lain, efektivitas pemasaran lot lelang juga tetap terjaga dengan Lot Laku mencapai 96,54%. Tingginya produktivitas ini berkontribusi signifikan pada penyelesaian aset bermasalah dan peningkatan penerimaan negara melalui bea lelang, sekaligus membuktikan bahwa lelang tetap menjadi instrumen jual-beli yang dipercaya oleh masyarakat.

**Sasaran  
Strategis V**

**Pelayanan  
Piutang  
Negara,  
Penilaian,  
dan Lelang  
yang  
Profesional  
dan Produktif**



- Indeks Kinerja Anggaran (IKA)

Target IKKA tahun 2025 adalah 100, realisasi selama tahun 2025 adalah 120 atau 120% dari target yang telah ditetapkan.

Implementasi kualitas pelaksanaan anggaran dapat diukur dari 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Capaian kinerja diperhitungkan sesuai dengan ketentuan SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan pengeluaran riil tiap bulannya seringkali tidak sesuai sehingga berdampak pada capaian akhir dari target kualitas pelaksanaan anggaran.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk pencapaian target IKU ini antara lain membuat prognosa rencana kerja tiap-tiap seksi dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk mencapai kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisasi Anggaran, sehingga berdampak pada capaian akhir dari target kualitas pelaksanaan anggaran menjadi baik.

Sasaran  
Strategis VI

Pengelolaan  
Keuangan  
dan BMN  
yang  
Akuntabel,  
serta SDM  
yang Adaptif

**LAPORAN CAPAIAN  
IKU INDEKS KINERJA ANGGARAN  
UNIT KPKNL LAHAT  
S.D TRIWULAN IV 2025**

**A. Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran s.d Triwulan IV TA 2025**

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Capaian s.d Triwulan I
<b>A. Nilai IKPA</b>		100%
1	Revisi DIPA	100%
2	Deviasi Hal III DIPA	100%
3	Belanja Kontraktual	100%
4	Pengelolaan UP dan TUP	100%
5	Dispensasi SPM	0%
6	Penyerapan Anggaran	100%
7	Penyelesaian Tagihan	100%
8	Capaian Output	100%
<b>B. Nilai SMART</b>		
98.43%		
<b>Nilai Capaian IKU IKA s.d Triwulan IV</b>		100%



- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang kredibel adalah fondasi dari operasional instansi yang bersih. Pada tahun ini, KPKNL Lahat mencatatkan performa istimewa dengan meraih Indeks Tata Kelola PBJ sebesar 120 dari target 100. Capaian ini merupakan cerminan dari komitmen kantor dalam mengedepankan prinsip transparan, terbuka, dan bersaing.

Keberhasilan ini didukung oleh pemenuhan 5 komponen utama secara paripurna, terutama pada aspek perencanaan melalui SIRUP yang memiliki bobot terbesar (60%). Selain itu, optimalisasi sistem elektronik melalui e-Tendering, e-Purchasing Katalog, e-Kontrak, serta kepatuhan pada prosedur Non e-Tendering memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara dikelola secara digital dan dapat dipertanggungjawabkan. Pencapaian indeks 120 ini menegaskan bahwa KPKNL Lahat telah mengadopsi budaya pengadaan modern yang efektif dan akuntabel.

- Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur sejauh mana pegawai di KPKNL Lahat telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Indikator ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai aset utama dalam menjalankan tugas dan fungsi institusi. Program pengembangan kompetensi mencakup berbagai aspek, seperti keahlian teknis, kepemimpinan, dan soft skills, yang dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Di KPKNL Lahat, pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui pendekatan yang terencana dan berbasis data, termasuk analisis kebutuhan pelatihan (training need analysis). Setiap pegawai diupayakan untuk mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengikuti pelatihan, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan peningkatan kompetensi berjalan secara merata. Persentase yang tinggi pada indikator ini menunjukkan keberhasilan KPKNL Lahat dalam membangun SDM yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik yang terus berkembang.



## Sasaran Strategis VII

### Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

- Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

IPenanganan perkara hukum merupakan garis pertahanan terakhir dalam menjaga kewibawaan negara atas aset dan piutang yang dikelola. Pada tahun ini, KPKNL Lahat mencatatkan performa gemilang dengan raihan Indeks Penanganan Permasalahan Hukum sebesar 115,42, melampaui target indeks 100.

Namun, di balik angka tersebut, terdapat strategi unik yang menjadi kunci keberhasilan KPKNL Lahat: Pendekatan Persuasif Pra-Ajudikasi. Sebelum perkara meruncing di persidangan, tim hukum KPKNL Lahat secara aktif mengedepankan ruang dialog. Kami mengajak pihak-pihak yang akan atau telah mengajukan gugatan untuk duduk bersama, membedah permasalahan, dan mencari solusi terbaik yang tetap koridor peraturan yang berlaku. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meredakan sengketa tanpa harus menguras energi dan sumber daya di pengadilan.

Keberhasilan kolektif ini didorong oleh dua pilar utama:

1. Efektivitas Penanganan di Pengadilan (Bobot 80%): Meraih skor 113,73, mencerminkan kualitas pendampingan hukum dan penyusunan argumen yang sangat kuat di meja hijau saat jalur litigasi tidak terhindarkan.
2. Kualitas Putusan Inkracht (Bobot 20%): Mencapai 122,22, menunjukkan bahwa mayoritas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selaras dengan kepentingan negara.

Capaian ini menegaskan bahwa KPKNL Lahat bukan hanya memiliki kompetensi hukum yang andal dalam menghadapi sengketa perdata maupun tata usaha negara, tetapi juga memiliki integritas untuk menghadirkan keadilan melalui jalan perdamaian dan kepatuhan hukum yang substansial.

"Bagi kami, kemenangan terbaik adalah ketika kepastian hukum tercapai melalui dialog dan solusi yang sesuai regulasi, bahkan sebelum palu hakim diketukkan."

- Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu ketepatan penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi Publik dihitung sejak permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat I. Dalam hal permohonan ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan informasi yang diminta terkait PPID Tingkat I, maka PPID Kemenkeu wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada PPID Tingkat I paling lambat 2 hari kerja setelah permintaan informasi dinyatakan lengkap melalui nota dinas dan/atau email, selanjutnya PPID Tingkat I wajib menyampaikan informasi kepada PPID Kementerian Keuangan melalui nota dinas dan/atau email paling lambat 13 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dan/atau email permohonan dari PPID Kemenkeu. Pemohon dapat menyampaikan permintaan informasi melalui email, surat, telepon, dan aplikasi e-ppid.

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berhasil mencapai nilai 139.06 (120%) dari target sebesar 80 (100%)





- Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko merupakan ukuran keberhasilan dalam mengintegrasikan pengelolaan kinerja organisasi dengan pengelolaan risiko yang efektif. Indikator ini mencerminkan sejauh mana KPKNL Lahat mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pencapaian tujuan yang sejalan dengan mitigasi risiko yang mungkin muncul. Pengelolaan kinerja dilakukan dengan menetapkan target yang jelas, terukur, dan realistis, sementara pengelolaan risiko mencakup identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target tersebut. Dengan pendekatan yang terstruktur, indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat akuntabilitas dan ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika operasional. Tingginya indeks ini mencerminkan komitmen KPKNL Lahat terhadap peningkatan kualitas manajemen yang berbasis data dan risiko, guna mendukung pencapaian tujuan strategis secara optimal dan berkelanjutan.

## Sasaran Strategis VIII

Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

## B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-015.09.2.506126/2025 Tanggal 2 Desember 2024. adalah sebesar Rp2.564.394.000 dengan realisasi sebesar Rp2.540.044.976 atau dengan persentase realisasi atas anggaran sebesar 99,05 %.

Adapun realisasi anggaran 2025 tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

### 1. Belanja Modal

Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.130.531.000 dengan realisasi sebesar Rp1.119.768.893 (99,05%)

### 2. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.433.863.000 dengan realisasi sebesar Rp1.420.276.083 atau sebesar 99,05%.

### 3. Belanja Pegawai

Dana yang dianggarkan untuk belanja pegawai pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar 100%.



---

Selama tahun 2025 KPKNL Lahat telah mendapatkan beberapa penghargaan (*achievement*) sebagai KPKNL Pengelola Kinerja Terbaik di Lingkungan Kanwil SJB.

**C.  
DATA DAN  
NARASI  
KINERJA  
LAINNYA**

Piagam dan sertifikat di atas menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari LAKIN KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2025.



# PENUTUP



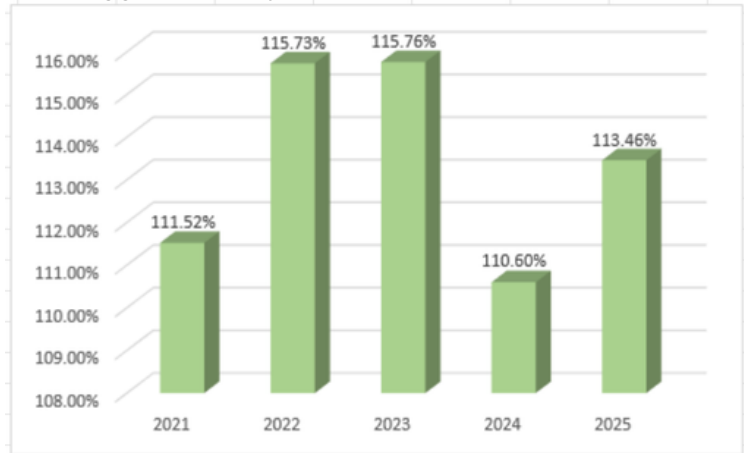
The background features a repeating pattern of light-colored molecular structures, including hexagonal and circular rings with various sized nodes. In the lower half, there are several horizontal, wavy blue lines. The bottom edge of the page is a solid dark blue color.

# **BAB 4**

## A. SIMPULAN

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2025 dengan sangat baik. Seluruh target atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan total 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three*. KPKNL Lahat Tahun 2025 dapat tercapai dengan sempurna. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 113,47% dari nilai maksimal 120%.

### NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KPKNL LAHAT 2021 - 2025



NKO pada tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan NKO pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tercapainya target PNBPN dan realisasi anggaran yang baik.

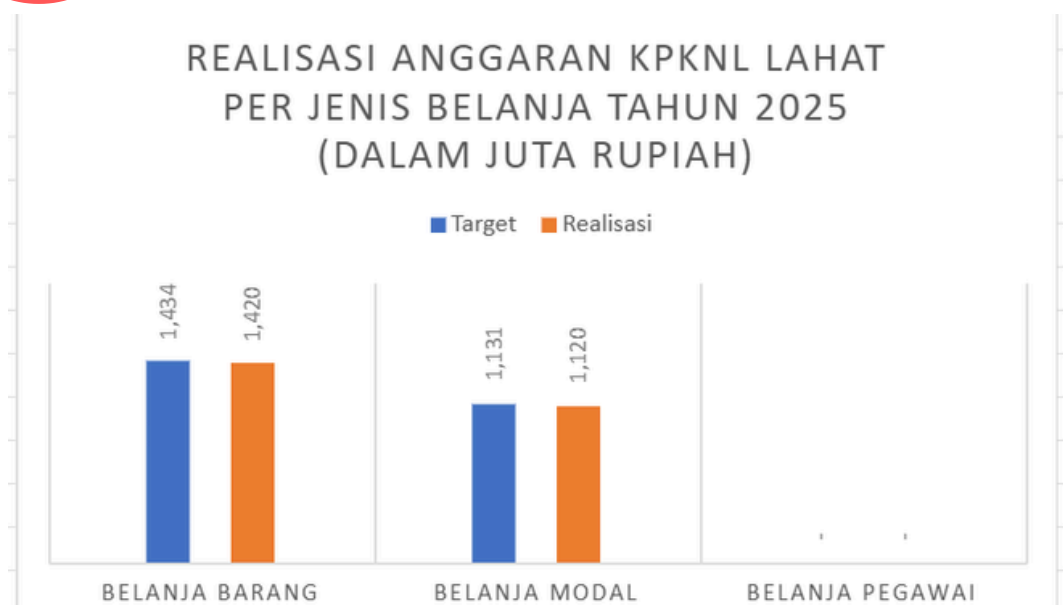
Sementara itu, total capaian serapan anggaran sampai dengan Tahun 2024 adalah Rp2.540.044.976 dari anggaran sebesar Rp2.564.394.000 atau terealisasi sebesar 99,05%.



### ANGGARAN & REALISASI KPKNL LAHAT TAHUN 2025

**99,05%**

#### REALISASI ANGGARAN KPKNL LAHAT PER JENIS BELANJA TAHUN 2025 (DALAM JUTA RUPIAH)



## KENDALA

Dalam perjalanannya, KPKNL Lahat menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika melaksanakan tugas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Lahat, pegawai KPKNL Lahat di tahun 2025 berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dimana 2 (dua) pegawai berstatus tugas belajar dengan sebaran wilayah kerja 8 (delapan) kabupaten/kota.
2. Masih rendahnya minat masyarakat dengan proses jual beli secara lelang yang mengakibatkan jumlah barang yang laku di wilayah KPKNL Lahat masih rendah, terutama untuk lelang eksekusi hak tanggungan.
3. Banyaknya lelang yang diestimasikan akan laku menjadi batal karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur.
4. Kultur budaya dimana biasanya orang enggan membeli barang lelang dikarenakan masih terikat hubungan kekerabatan, terutama pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan serta adanya anggapan bahwa barang lelang adalah barang bermasalah.
5. Masih rendahnya tingkat pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang juga disebabkan oleh banyaknya peraturan/ketentuan yang baru menyebabkan masih adanya perbedaan pemahaman dari stakeholder dalam menafsirkan peraturan terkait tugas dan fungsi KPKNL;
6. Cukup banyak satuan kerja dari *stakeholder* yang belum mampu memberdayakan secara maksimal teknologi informasi;
7. Penyampaian dokumen oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
8. Wilayah kerja KPKNL Lahat yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas;

## B. SARAN

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Lahat adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Lahat agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, saat ini KPKNL Lahat lebih fokus untuk menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Lahat adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerja sama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang, utamanya lelang Barang Milik Daerah (BMD)
6. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
9. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegoatan yang bersifat lintas unit;
10. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
11. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi Kekayaan Negara dan sertifikasi BMN.



Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat Tahun Anggaran 2025 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Kami berharap LAKIN ini dapat memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Lahat.

Selanjutnya, LAKIN ini semoga dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan *stakeholder* serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

**Lahat, 20 Januari 2026**  
**Kepala Kantor**

**Muh. Tajus Syarifin**



# LAMPIRAN

PEJABAT PENGAWAS





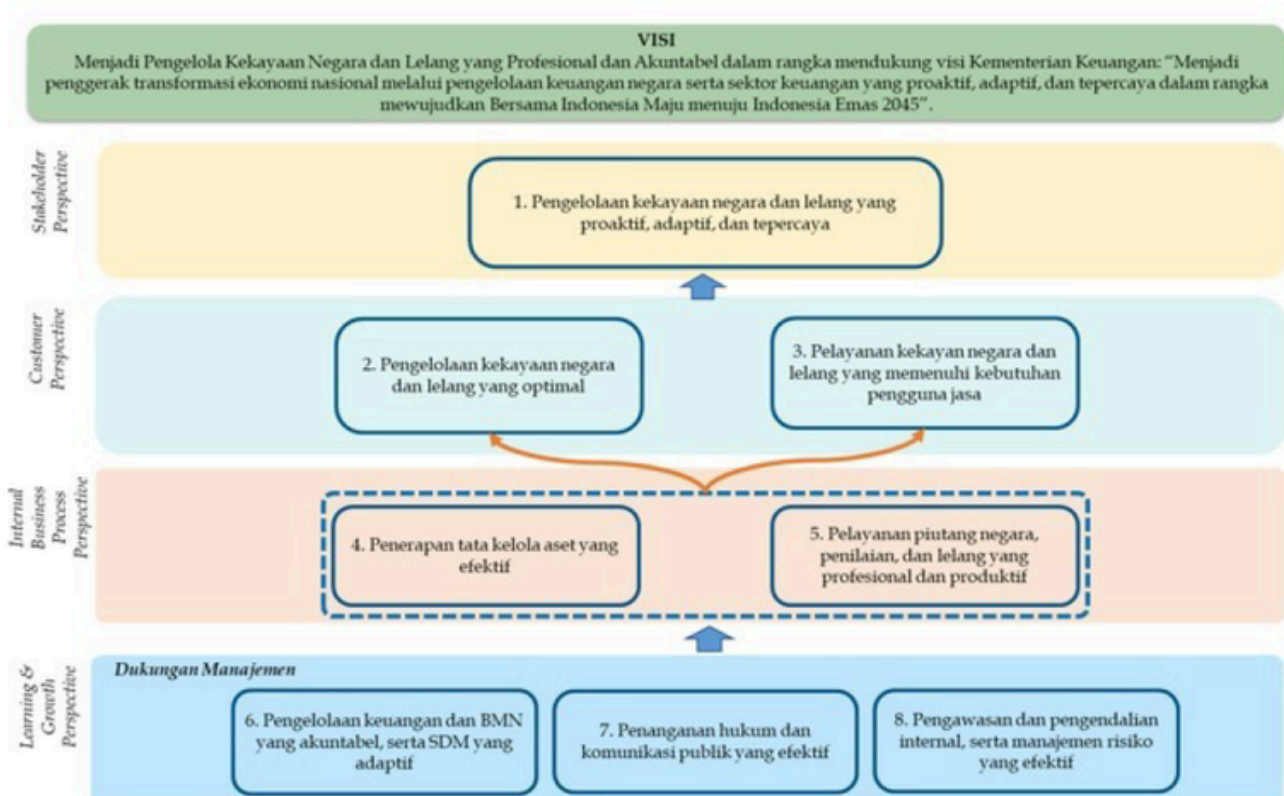
**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-3/WKN.04/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**LAHAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
LAHAT  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,8 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp58 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp195 Jt)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%

6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

**Program/Kegiatan 2025**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Kegiatan

**Anggaran**

Rp265,553,000

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp50,087,000
2. Pengelolaan Aset	Rp215,466,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp2,429,414,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp21,292,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,369,424,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp22,450,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp16,248,000

Kab. Lahat, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi,  
dan Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ferdinan Lengkong

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Lahat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Muh. Tajus Syarifin

**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
LAHAT  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,8 M)
2	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp58 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp195 Jt)
3	<b>Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa</b>							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	<b>Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	<b>Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	<b>Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	<b>Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	<b>Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kab. Lahat, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Lahat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Muh. Tajus Syarifin

SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Muh. Tajus Syarifin	NAMA	Ferdinan Lengkong	
NIP	19850815 200710 1 002	NIP	19661212 199103 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Penata Tingkat I (III/d)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	
NO (1)	RENCANA HASIL KERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)	PERSPEKTIF (5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,8 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp58 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp195 jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

	Kebutuhan Pengguna Jasa				
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis	
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis	
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis	
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis	
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis	
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran	
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran	
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran	
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran	
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran	
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran	
<b>B. TAMBAHAN</b>					

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdeklasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

## PERILAKU KERJA

<p>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</p> <p>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</p> <p>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</p>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
<p>6</p> <p>Adaptif</p> <p>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</p> <p>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</p> <p>-Bertindak proaktif</p>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
<p>7</p> <p>Kolaboratif</p> <p>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</p> <p>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</p> <p>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</p>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Kab. Lahat, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Ferdinan Lengkong

19661212 199103 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Muh. Tajus Syarifin

19850815 200710 1 002

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 21 pegawai
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>									
No	IKI	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Rp5,8 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Rp58 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Rp195 It)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74	74

4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

**KONSEKUJENSI**

*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*

*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*



Kab. Lahat, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Ferdinan Lengkong

19661212 199103 1 001

Pegawai yang Dimilai,



Ditandatangani secara elektronik

Muh. Tajus Syarifin

19850815 200710 1 002

NILAI KINERJA ORGANISASI  
KPKNI, LAHAT  
PERIODE s.d. Triwulan IV 2025

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Validitas / Kendali	Target	Realisasi	Bobot Awal IKU	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Capaian Max (120%)	Keterangan	
<b>1 Stakeholder Perspective (30%)</b>		<b>30%</b>						<b>31,09%</b>		
1a-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya Indeks Integritas	P/L	100	105	19%	57,58%	105,29%	103,63%	105,29%	Hijau
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	101,37%	14%	42,42%	101,37%	101,37%	101,37%	Hijau
<b>2 Customer Perspective (20%)</b>		<b>20%</b>						<b>23,32%</b>		
<b>2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>								<b>113,15%</b>		
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	P/L	100%	103,64%	19%	37%	103,64%	103,64%	103,64%	Hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/L	100%	117,62%	19%	37%	117,62%	117,62%	117,62%	Hijau
2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	P/M	100%	169%	14%	27%	168,76%	120,00%	120,00%	Hijau
<b>3 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa</b>								<b>120,00%</b>		
3a-N	Indeks Kepuasa Pengguna Layanan	P/M	77	98,26	14%	50%	127,61%	120,00%	120,00%	Hijau
3b-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	P/M	74	96,95	14%	50%	131,01%	120,00%	120,00%	Hijau
<b>4 Internal Process Perspective (25%)</b>		<b>25%</b>						<b>29,25%</b>		
<b>4 Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif</b>								<b>114,00%</b>		
4a-CP	Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/M	100%	108,00%	14%	50%	108,00%	108,00%	108,00%	Hijau
4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)	P/M	100%	557,71%	14%	50%	557,71%	120,00%	120,00%	Hijau
<b>5 Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif</b>								<b>120,00%</b>		
5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100%	125,17%	14%	33%	125,17%	120,00%	120,00%	Hijau
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	P/M	70%	109,83%	14%	33%	156,90%	120,00%	120,00%	Hijau
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80%	110,61%	14%	33%	138,27%	120,00%	120,00%	Hijau
<b>6 Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>		<b>25%</b>						<b>29,81%</b>		
<b>6 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif</b>								<b>120,00%</b>		
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKKA)	P/M	100	120	14%	33%	120,00%	120,00%	120,00%	Hijau
6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	P/M	100	120	14%	33%	120,00%	120,00%	120,00%	Hijau
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	80%	131%	14%	33%	163,68%	120,00%	120,00%	Hijau
<b>7 Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif</b>								<b>117,71%</b>		
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	P/M	100	115,42	14%	50%	115,42%	115,42%	115,42%	Hijau

7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80	111	14%	50%	139,06%	120,00%	Hijau	
8	<b>Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif</b>							<b>120,00%</b>		
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	80	96,63	14%	100%	120,79%	120,00%	Hijau	
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)</b>										
								<b>113,46%</b>		<b>Hijau</b>

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Muh. Tajus Syarifin



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG

# PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

# KPKNL LAHAT

atas prestasi Pengelola Kinerja Terbaik Tahun 2024  
di Lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

PALEMBANG, 26 MARET 2025  
KEPALA KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN  
BANGKA BELITUNG



Ditandatangani secara elektronik  
**FERDINAN LENGKONG**

